

**PENGUATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG DALAM
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GAMPONG DI
GAMPONG ULEE LUENG KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

YOSSY DEWIRNA

NIM. 200802037

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yossy Dewirna
Nim : 200802037
Proram Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Manggis Harapan, 25 Agustus 2002
Alamat : Gp. Manggis Harapan, Kec.
Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan

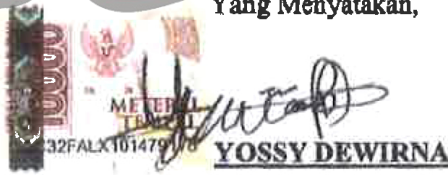
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2024
Yang Menyatakan,


YOSSY DEWIRNA
NIM. 200802037

**PENGUATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG DALAM
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GAMPONG DI
GAMPONG ULEE LUENG KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

YOSSY DEWIRNA

NIM. 200802037

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui untuk dimunqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004**

**Cut Zamharira, S.IP., M.A.P
NIDN. 2017117904**

**PENGUATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG DALAM
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GAMPONG DI
GAMPONG ULEE LUENG KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

YOSSY DEWIRNA

NIM. 200802037

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004


Cut Zamhrira, S.I.P., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,


Muazzinah M.P.A
NIP. 198411252019032012


Dicky Izmi Syahputra, S.I.P., M.I.P., M.P.A
NIP. -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Sistem informasi Gampong adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh yang bertujuan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Gampong, administrasi Gampong, dan tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama belum optimalnya penguatan kapasitas sumber daya aparatur Gampong dan langkah apa yang harus dilakukan aparatur Gampong dalam penggunaan aplikasi sistem informasi Gampong di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi sistem informasi gampong masih belum maksimal karena pihak operator gampong masih belum cukup terampil bagaimana cara mengoperasikan SIGAP, kemudian masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses penginputan data ke SIGAP.

Kata Kunci: *Penguatan Kapasitas, Sumber Daya Aparatur, Penggunaan Sistem Informasi Gampong*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat islam.

Skripsi ini berjudul “Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar” merupakan sebuah karya tulis ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada awalnya peneliti mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini, namun berkat doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini mampu diselesaikan oleh peneliti. Maka oleh karena itu skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang terhebat dan teristimewa dalam hidup peneliti, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., M.PA., sebagai Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan UIN Ar-Raniry.

4. Siti Nur Zalikha, M.Si., sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A., sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, dan saran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Cut Zamharira, S.IP., M.A.P., sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, dan saran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Ayahanda Almarhum Amran Dan Ibu Darwisah tercinta yang selalu memberikan nasehat, mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan serta semua mahasiswa seangkatan 2020 yang saling membantu dan memberikan masukan kepada peneliti. Terima kasih untuk semua kerjasama dan dukungannya selama ini.
10. Dan ribuan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini.

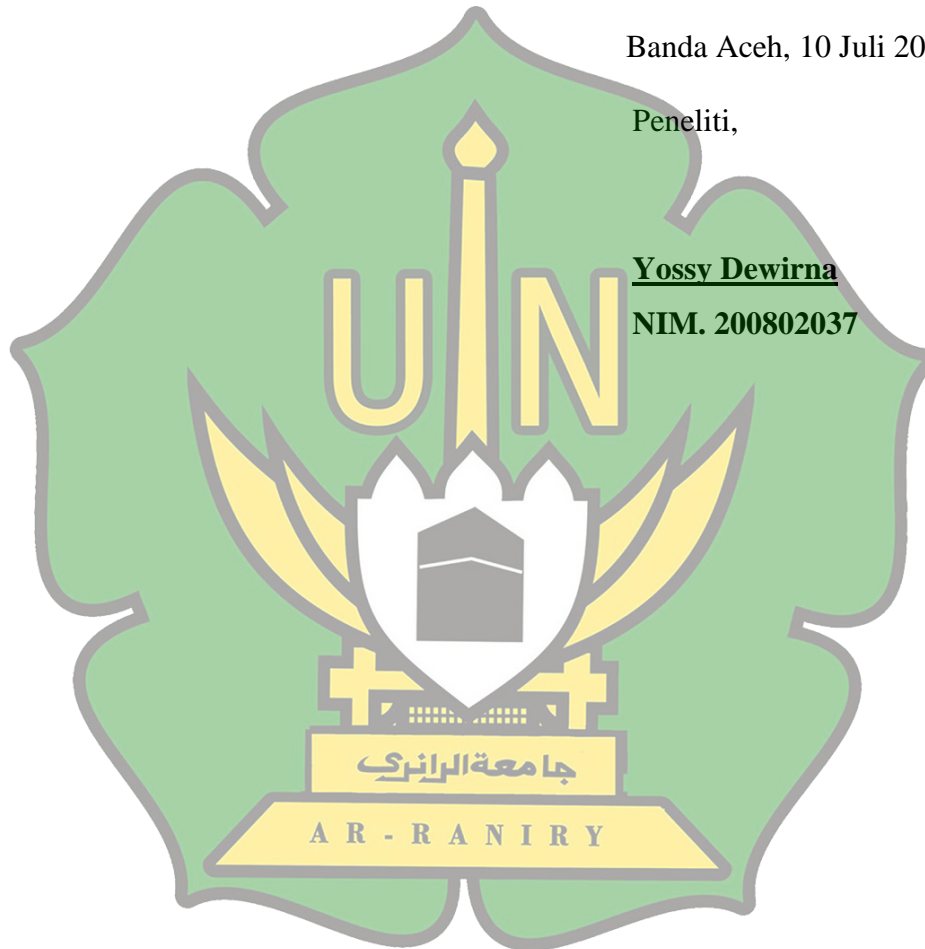
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyaknya kekurangan dan keterbatasan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan, kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Demikianlah yang dapat peneliti

sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Peneliti,

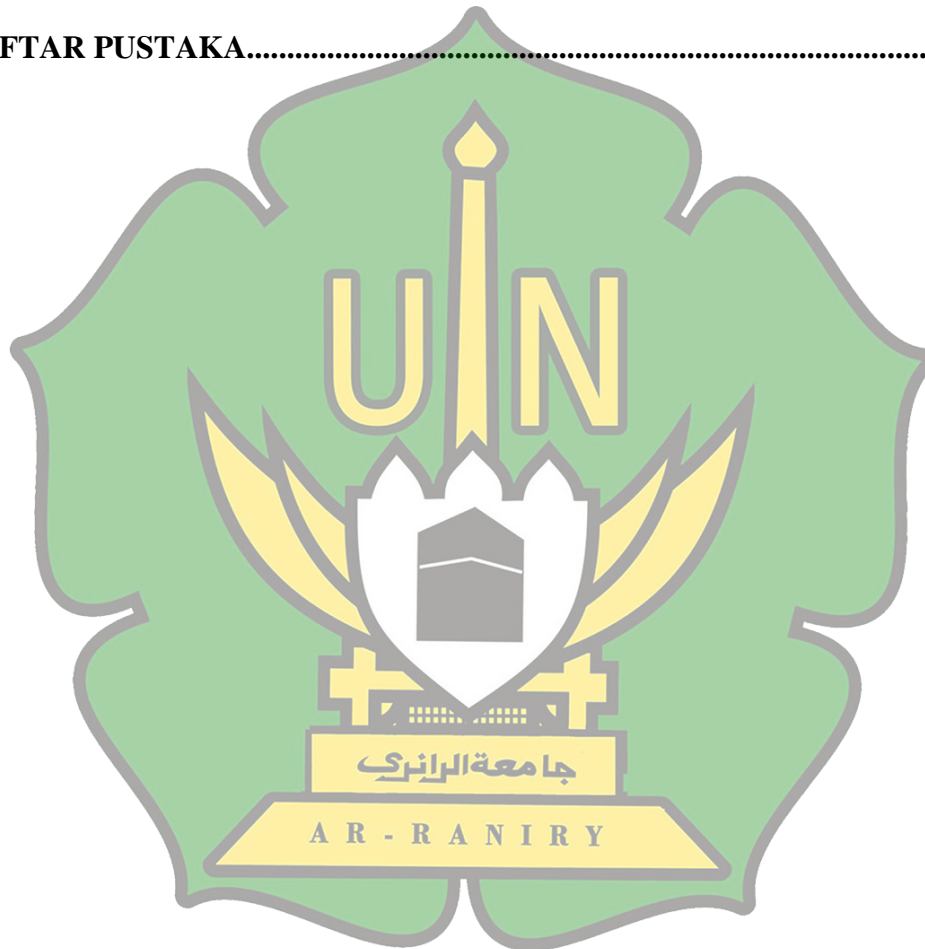
Yossy Dewirna
NIM. 200802037



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PRMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori Dan Konsep	10
2.2.1. Konsep Kapasitas	10
2.2.2. Konsep Sumber Daya Manusia	11
2.2.3. Aplikasi SIGAP	15
2.2.4. Konsep Otonomi Gampong	18
2.3. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian	27
3.2. Fokus Penelitian	28
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	29
3.5. Informan Penelitian	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	36
4.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	36
4.2. Hasil dan Pembahasan	41
4.2.1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	41
4.2.2. Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	44
4.2.3. Latar Belakang Sistem Informasi Gampong	46

4.2.4. Faktor Yang Menyebabkan Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng	51
4.2.5. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Aparatur Gampong Dalam Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong.....	60
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Fokus masalah penelitian pertama	28
Tabel 3.2. Fokus masalah penelitian kedua	29
Tabel 3.3. Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1. Batas-Batas Gampong Ulee Lueng	37
Table 4.2. Jenis Pekerjaan Warga Gampong Ulee Lueng.....	38
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Di Gampong Ulee Lueng.....	40
Tabel 4.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Periode 2019-2024	40
Tabel 4.5. Susunan Personalia Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Gampong Tahun 2022	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	23
Gambar 4.1. Peta Gampong Ulee Lueng	36
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	46



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry	75
Daftar Lampiran 2. Surat Penelitian.....	76
Daftar Lampiran 3. Surat Keputusan Operator Gampong Ulee Lueng.....	77
Daftar Lampiran 4. Pedoman Wawancara	79
Daftar Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 saat ini telah membawa daerah-daerah di Indonesia pada tingkat kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat maju. Hal ini menjadikan berbagai sistem informasi yang dibutuhkan dapat diakses melalui bantuan teknologi. Dampak dari kemajuan sistem teknologi menghadirkan sebuah aplikasi berupa Sistem Informasi Gampong (SIGAP). SIGAP merupakan sebuah aplikasi yang berisi data-data penting dari setiap Gampong yang ada di daerah-daerah Indonesia. Fungsi dari aplikasi SIGAP diantaranya sebagai media pengelolaan data kependudukan, perencanaan dan penganggaran APBG, pengelolaan data Baitul Mal Gampong, dan data sektoral lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Gampong menyebutkan bahwa SIGAP (Sistem Informasi Gampong) dikembangkan oleh “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DMPG) bersama Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh melalui dukungan oleh Masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan (KOMPAK)”¹

Sistem informasi Gampong umumnya dikelola oleh aparatur masing-masing Gampong dan dapat diakses oleh Masyarakat luas. Beberapa Kabupaten (Bireun, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Barat) yang

¹ Sistem Informasi Gampong et al., “Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021,” 2021, 2–10.

beroperasi di Aceh telah memiliki operator terlatih dalam menyediakan informasi dasar sesuai dengan kondisi keadaan Gampong masing-masing. Hal ini diharapkan agar seluruh aparatur Gampong dapat menginput data dengan baik dan benar, karena akan berdampak besar pada perencanaan dan penganggaran Gampong di masa mendatang.²

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Gampong pada Pasal 6 menyatakan bahwa perangkat yang digunakan untuk penerapan SIGAP meliputi, Perangkat Keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan aplikasi SIGAP, Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk aplikasi dan database, dan perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIGAP.³

Aplikasi SIGAP diluncurkan dengan harapan setiap Masyarakat dapat mengakses informasi Gampong sehingga dapat bermanfaat dalam menampung keluhan Masyarakat dan meningkatkan pelayanan Masyarakat menjadi lebih Sejahtera. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap warga negara dan penduduk baik berupa barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁴

² Gampong et al.

³ Gampong et al.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," *Bphn.Go.Id* 2003, no. 1 (2009): 3.

Gampong Ulee Lueng merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Adapun data-data di Gampong Ulee Lueng memiliki keterbatasan diantaranya dokumen yang kurang lengkap, kemudian data-data Gampong tidak diperbarui dan masih menggunakan data pada tahun-tahun sebelumnya ini sangat berpengaruh untuk keadaan di masa yang akan mendatang, karena data yang disajikan tidak bersifat terbaru.⁵

Peningkatan kapasitas aparatur Gampong merupakan poin penting dalam meningkatkan pelayanan prima kepada Masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi dan lainnya di tingkat pemerintahan Gampong. Terdapat indikator dalam kemampuan aparatur yaitu ketepatan waktu pelaksanaan kerja, efisiensi dan kecepatan dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyedia layanan ditentukan berdasarkan kepuasan yang diharapkan dari penerima layanan.⁶

Qanun Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu Pasal 4 yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, mengelola satu data pembangunan dan pelayanan yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pelayanan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dan Pemerintah Gampong. Meningkatkan pelayanan informasi publik secara tepat, akurat, mudah, tepat, dan terbaru, dan

⁵ Wawancara awal penelitian dengan Operator Gampong di Gampong Ulee Lueng Pada Saat KPM Tematik Pada Tanggal 28 Agustus 2023.

⁶ Indonesian Community Service, "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Keude Jirat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara" 4, no. 1 (2023): 356–66.

mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan Aceh cerdas yang berkelanjutan.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Gampong adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan praaksara Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Gampong merupakan suatu organisasi pemerintahan yang mempunyai kewenangan tertentu untuk memerintah dan mengatur warganya, dan di dalam peranan tersebut Gampong juga mempunyai peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 1 Nomor 10-11 menyebutkan bahwa Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.⁹

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, untuk mengetahui Tingkat penggunaan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng dan melihat

⁷ “Qanun Aceh No. 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu,” 2020.

⁸ Daniel Bender, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

⁹ WaliKota Banda Aceh, “Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong Pasal 1 Ayat 15,” 2019.

tingkat perbaikan dan pembaharuan sistem kedepannya setelah penggunaan aplikasi SIGAP. Peneliti tertarik untuk melakukan survey lebih lanjut untuk memperoleh data kualitatif.



1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam penguatan kapasitas aparatur Gampong belum sepenuhnya terealisasi dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi.
2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sistem informasi gampong dalam proses penginputan data Gampong.

1.3 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Gampong di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar belum berjalan dengan baik?
2. Langkah apa saja yang dilakukan oleh aparatur Gampong untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat apa yang menjadi faktor utama belum optimalnya penguatan kapasitas sumber daya aparatur Gampong dalam penggunaan aplikasi sistem informasi gampong.
2. Untuk melihat langkah-langkah apa saja yang dilakukan aparatur Gampong dalam penggunaan aplikasi sistem informasi gampong.

1.5 Manfaat Penelitian

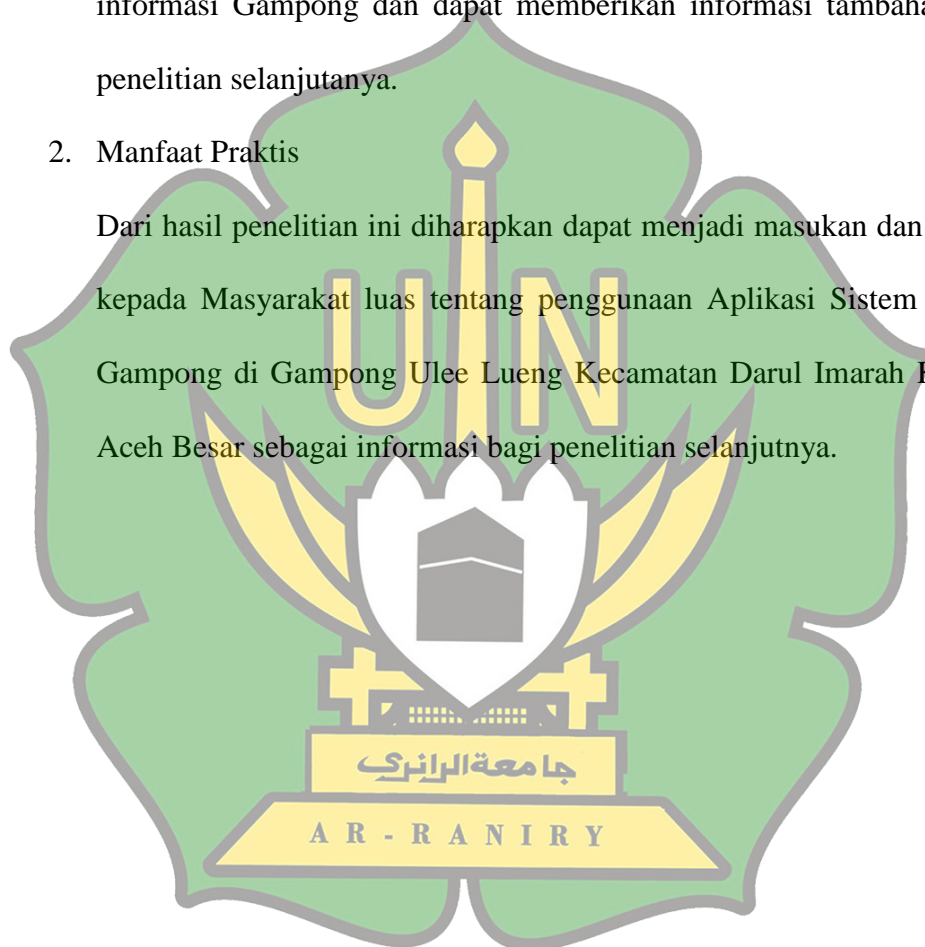
Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan, pengetahuan, dan keilmuan yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi sistem informasi Gampong dan dapat memberikan informasi tambahan bagi si penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi kepada Masyarakat luas tentang penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Edo Defrian Ramadhon, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung berjudul Kapasitas Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (Studi Di Gampong Banjaragung, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur Pekon yang ada di Pekon Banjar Agung secara umum dari segi sumber daya manusia, pelatihan, keterampilan, sarana prasarana serta penyampaian informasi publik terhadap Masyarakat sudah cukup baik. Sedangkan kapasitas aparatur Pekon secara khusus yang melaksanakan sistem informasi Gampong (SID) melalui website tidak sangat baik, dikarenakan tidak ada sumber daya aparatur yang terlatih dan bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakannya.¹⁰
2. Riza Darma Putra, Desti Fitriati, Muhammad Rosit, Elvina Lathifa, dan Agung Arya Mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila berjudul Peningkatan Literasi Internet Dan Penguatan Sistem Informasi Gampong Bagi Perangkat Gampong Kiarasari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih

¹⁰ Edo Defrian Ramadhon, "Kapasitas Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (Studi Di Gampong Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)" 01 (2023): 1–23.

adanya gap atau jarak antara fasilitas dan kebijakan penggunaan internet dengan pemahaman atau literasi bagi para perangkatnya dalam menggunakan internet.¹¹

3. Rima Adhi Hapsari, Sudaryanti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Gampong Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintahan Ngimbrang dilakukan melalui dua jenis kegiatan, yaitu pembimbingan teknis (Bimtek) serta kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat).¹²
4. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu yang pertama ditinjau dari segi lokasi studi yang dimana tentu saja memiliki tempat yang berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya, kemudian bisa dilihat dari pembahasan penelitiannya juga terdapat perbedaan dan metodologi penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

¹¹ Riza Darma Putra and Muhamad Rosit, "Peningkatan Literasi Internet Dan Penguatan Sistem Informasi Gampong Bagi Perangkat Gampong Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor," *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 13, no. 1 (2022): 26–37, <https://doi.org/10.35814/coverage.v13i1.3518>.

¹² Rima Adhi Hapsari, "Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Gampong Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.8385>.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Konsep Kapasitas

Kapasitas merupakan suatu konsep yang sangat teknis dan telah lama dikenal dalam praktik organisasi Negara. Secara umum, kapasitas organisasi Gampong hampir seluruh Gampong di Indonesia relatif rendah dan belum mendapat perhatian signifikan dari pemerintah Gampong. Oleh karena itu, diperlukan langkah dan tindakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah Gampong agar permasalahan perencanaan pembangunan Gampong yang selama ini menjadi kendala dapat teratasi. Pembangunan infrastruktur Gampong yang selama ini menjadi fokus pembangunan Gampong hendaknya mulai bergeser ke arah pengembangan keterampilan personal secara umum, termasuk pengembangan keterampilan individu dan organisasi pengelola Gampong.¹³

Penguatan kapasitas tersebut adalah dengan memperkuat kapasitas setiap individu, komunitas, lembaga dan jaringan antar individu dan organisasi sosial, serta aktor pihak lain diluar Masyarakat dan global lainnya. Peningkatan kapasitas adalah proses peningkatan kapasitas kelompok, organisasi dan lembaga lainnya untuk memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas.¹⁴

¹³ Theodoros Theodoridis and Juergen Kraemer, "Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Gampong Di Gampong Oben Kabupaten Kupang" 2, no. 2 (n.d.): 335–56.

¹⁴ X-ray Diffraction Crystallography, "Penguatan Kapasitas UMKM," 2016, 1–23.

Adapun tujuan pengembangan kapasitas dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁵

1. Secara umum diidentifikasi pada perwujudan *sustainability* (keberlanjutan) suatu sistem.
2. Sistem khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:
 - a. Efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*.
 - b. Efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
 - c. Responsivitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
 - d. Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi, dan sistem.

2.2.2 Konsep Sumber Daya Manusia

Secara umum pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai pengelola suatu organisasi, lembaga, dan perusahaan, serta berperan sebagai aset yang keterampilannya harus dilatih dan dikembangkan. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau metode tentang bagaimana mengelola hubungan dan peran sumber daya (tenaga kerja) milik individu secara efektif dan efisien dan dapat dimanfaatkan

¹⁵ Ana Roby Astiwi, "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Studi Pada Biro Sumber Daya Manusia Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia).," *Journal Repository Universitas Brawijaya* 2, no. 89 (2018): 1–177, [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162961/1/Ana Roby Astiwi.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162961/1/Ana_Roby_Astiwi.pdf).

secara optimal sehingga mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia didasarkan pada gagasan bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan sekadar sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Dalam praktiknya, mendefinisikan beberapa istilah yang mempunyai arti sama atau hampir sama dengan MSDM dengan fokus atau penekanan yang sedikit berbeda.¹⁶

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, baik instansi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan berkembangnya perusahaan, pada dasarnya SDM sama saja dengan orang-orang yang bekerja dalam organisasi sebagai penggerak tercapainya tujuan organisasi. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah orang-orang yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau organisasi dan biasa disebut pegawai, pekerja, buruh, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain. Sedangkan definisi makro sumber daya manusia adalah jumlah penduduk bekerja di suatu negara, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.¹⁷

¹⁶ Al Fadjar Ansory and Meithiana Indrasari, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2018, <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/891>.

¹⁷ Ansory and Indrasari.

Fungsi sumber daya manusia terbagi dua yaitu fungsi manajerial dan operasional.¹⁸

1. Fungsi manajerial

- 1) Perencanaan. Perencanaan adalah suatu rencana tenaga kerja yang dikerjakan secara efektif serta efisien dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
- 2) Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.
- 3) Pengarahan. Pengarahan adalah suatu kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan Masyarakat.
- 4) Pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan karyawan agar mentaati peraturan yang perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

¹⁸ Fabiani Sofie and Sisca Eka Fitria, "Identifikasi Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Usaha Menengah (Studi Pada CV. Kota Agung)," *Jurnal Wacana Ekonomi* 18, no. 1 (2018): 1–12, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/454>.

2. Fungsi Operasional

- 1) Pengadaan. Pengadaan merupakan suatu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan.
- 2) Pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung yang berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
- 4) Pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan suatu kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
- 5) Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tetap mau bekerja sama hingga pensiun.
- 6) Kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan suatu fungsi manajemen sumber daya manusia terpenting dan kunci

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

- 7) Pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

Pentingnya manajemen SDM dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan Masyarakat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁹

Fungsi SDM pada dasarnya mencakup beberapa fungsi yang mempunyai dampak signifikan terhadap wilayah kerja seluruh perusahaan, terdiri dari analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, pengadaan karyawan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, keselamatan atau kesehatan, perencanaan karir dan pemberhentian pekerjaan.²⁰

2.2.3 Aplikasi SIGAP

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Gampong, Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota dan

¹⁹ Baharuddin dan Moh. Makin, "Baharuddin Dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010),h. 61. 1," 2018, 69, <http://repository.uin-malang.ac.id/1440/>.

²⁰ Herman Sofyandi, "Manajemen Sumber Daya Manusia," 2008, 148.

pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan SIGAP. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah satuan kerja perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disingkat SIGAP adalah sistem informasi yang didirikan oleh pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan bagi Masyarakat Gampong. Potensi Gampong adalah seluruh sumber daya yang dimiliki atau dimanfaatkan Gampong, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan, serta prasarana dan sarana yang menunjang percepatan kesejahteraan Masyarakat.

Fungsi Sistem Informasi Gampong yaitu sebagai:²¹

- a) Media pengelolaan data kependudukan, perencanaan dan penganggaran APBG, pengelolaan data Baitul Mal Gampong, dan data sektoral lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong;
- b) Media pendukung pelayanan pemerintahan Masyarakat secara cepat dan tepat;
- c) Media informasi pembangunan Gampong yang akuntabel, transparan, dan inklusif;
- d) Media pengelolaan informasi, sumber daya dan potensi Gampong;

²¹ Sistem Informasi Gampong et al., "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021," 2021, 2–10.

- e) Media partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Gampong yang berbasis kebutuhan sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
- f) Media integrasi bagi aplikasi lainnya di Gampong.

Muatan Sistem Informasi Gampong meliputi yakni:²²

1. Informasi Gampong

Informasi Gampong ini terdiri dari

- a. Profil Gampong;
- b. Regulasi;
- c. Kegiatan dan kinerja Gampong;
- d. Dokumen Pembangunan;
- e. Rencana dan Anggaran;
- f. Laporan Keuangan;
- g. Peta;
- h. Jumlah Penduduk; dan
- i. Capaian *Sustainable Development Goals* Gampong.

2. Data Gampong

Data Gampong ini terdiri dari

- a. Data Kesehatan;
- b. Data Pendidikan;
- c. Data Kependudukan;
- d. Data Bantuan; Dan

²² Gampong et al.

- e. Basis Data Terpadu/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Registrasi Sosial Ekonomi.

3. Layanan Gampong

Layanan Gampong ini terdiri dari

- a. Surat Menyurat;
- b. Arsip Surat;
- c. Layanan Pengaduan Masyarakat;
- d. Jumlah Pengaduan Yang Diterima;
- e. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Pengaduan;
- f. Jumlah Tindak Lanjut Dan Penolakan Pengaduan;
- g. Alasan Penolakan Pengaduan;
- h. Timbal Balik Penilaian Kinerja; Dan
- i. Layanan Lainnya.

Peraturan gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari sistem informasi, pengelolaan data, layanan keterbukaan informasi publik untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas serta berkelanjutan di Gampong.²³

2.2.4 Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa terbentuk secara historis dan mempunyai hak mandiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Namun, pemerintah telah melakukan perubahan dalam

²³ Gampong et al.

pembangunannya, seperti Undang-undang dan Peraturan Gampong, untuk lebih mendorong pembangunan pergamponan dan sistem pengelolaan Gampong seperti yang dikeluarkan dalam Undang-undang dan Peraturan mengenai desa.²⁴

Menurut Widjaja (dalam Aji Priambodo), otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Di sisi lain, pemerintah wajib menghormati otonomi desa yang sesungguhnya sebagai kesatuan hukum yang asli berdasarkan hak-hak khusus, Gampong dapat melakukan perbuatan hukum umum maupun perdata, memiliki harta benda dan kekayaan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.²⁵

Otonomi desa merupakan otonomi yang sudah ada sejak berdirinya Gampong. Otonomi Gampong berdasarkan adat istiadat, meliputi kehidupan lahir dan batin penduduk Gampong, tidak bersumber dari subsidi pemerintah. Otonomi desa berarti otonomi Masyarakat setempat atau Masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri. Namun hakikatnya otonomi daerah (*local autonomy*) berbeda dengan kedaulatan, karena otonomi daerah merupakan otonomi Masyarakat lokal yang menyangkut berbagai urusan pengelolaan yang bersifat lokal. Dengan demikian, Gampong lebih dipahami sebagai suatu

²⁴ Kenyataan Sebuah and Tinjauan Kritis, "Pelayanan Publik Di Era Otonomi Gampong Antara Harapan Dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis)" 3, no. 2 (2019).

²⁵ Aji Priambodo, Universitas Perwira Purbalingga, and Kata Kunci, "Pengaruh Kinerja Pemerintah Gampong," *Jurnal Manajemen, Keuangan Dan Komputer* 2, no. 4 (2019): 32–42, https://jurnal.poltektriguna.ac.id/Nov2019/32_42.pdf.

kesatuan wilayah hukum yang dihuni oleh suatu Masyarakat yang mempunyai hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri.²⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar yang kuat bagi Gampong untuk melaksanakan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi menjadi level administrasi atau tingkat yang lebih rendah di wilayah tersebut, tapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” adalah desa dan komunitasnya mempunyai hak untuk berbicara atas nama komunitasnya sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur Gampong secara mandiri, termasuk di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kemandirian tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat Gampong dalam pembangunan sosial dan politik.²⁷

Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah Provinsi, maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi Gampong didasarkan pada asal usul dan adat istiadatnya, dan bukan berdasarkan pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah. Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten. Landasan yang dikembangkan saat ini adalah

²⁶ Wawan Kokotiasa, “Jurnal Administrasi Pemerintahan Gampong, V2. 11,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Gampong* 2576, no. 2 (2021): 11–23, <https://doi.org/10.32669/village>.

²⁷ Zulman Barniat et al., “Otonomi Gampong Konsep Teoritis Dan Legal” 2, no. 2 (2018): 107–20.

keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan Masyarakat.²⁸

Dalam bentuk aslinya, otonomi desa adalah hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁹

1. Pemerintahan desa terdiri atas kepala Gampong dibantu oleh pamong Gampong. Kepala Gampong dipilih oleh Masyarakat Gampong.
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di Gampong adalah rapat desa.
3. Gotong royong sebagai wujud otonomi desa.

Tugas utama pemerintah mengenai otonomi desa adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis, cepatnya penyediaan pelayanan publik dan sipil serta terciptanya kepercayaan Masyarakat terhadap kemandirian Gampong, oleh karena itu desa tidak dikelola secara teknokratis melainkan Gampong harus mampu mengintegrasikan realitas Kota, perkembangan teknologi berdasarkan sistem nilai lokal yang mencakup tata aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata sosial lainnya. Potensi Gampong berupa hak atas tanah, potensi penduduk, pusat perekonomian dan dinamika sosial politik yang dinamis dilandasi oleh kearifan dan profesionalisme pemerintahan Gampong terhadap

²⁸ Priambodo, Purbalingga, and Kunci, "Pengaruh Kinerja Pemerintah Gampong."

²⁹ UIN Suska Riau, "Otonomi Gampong," 2019, 7–8.

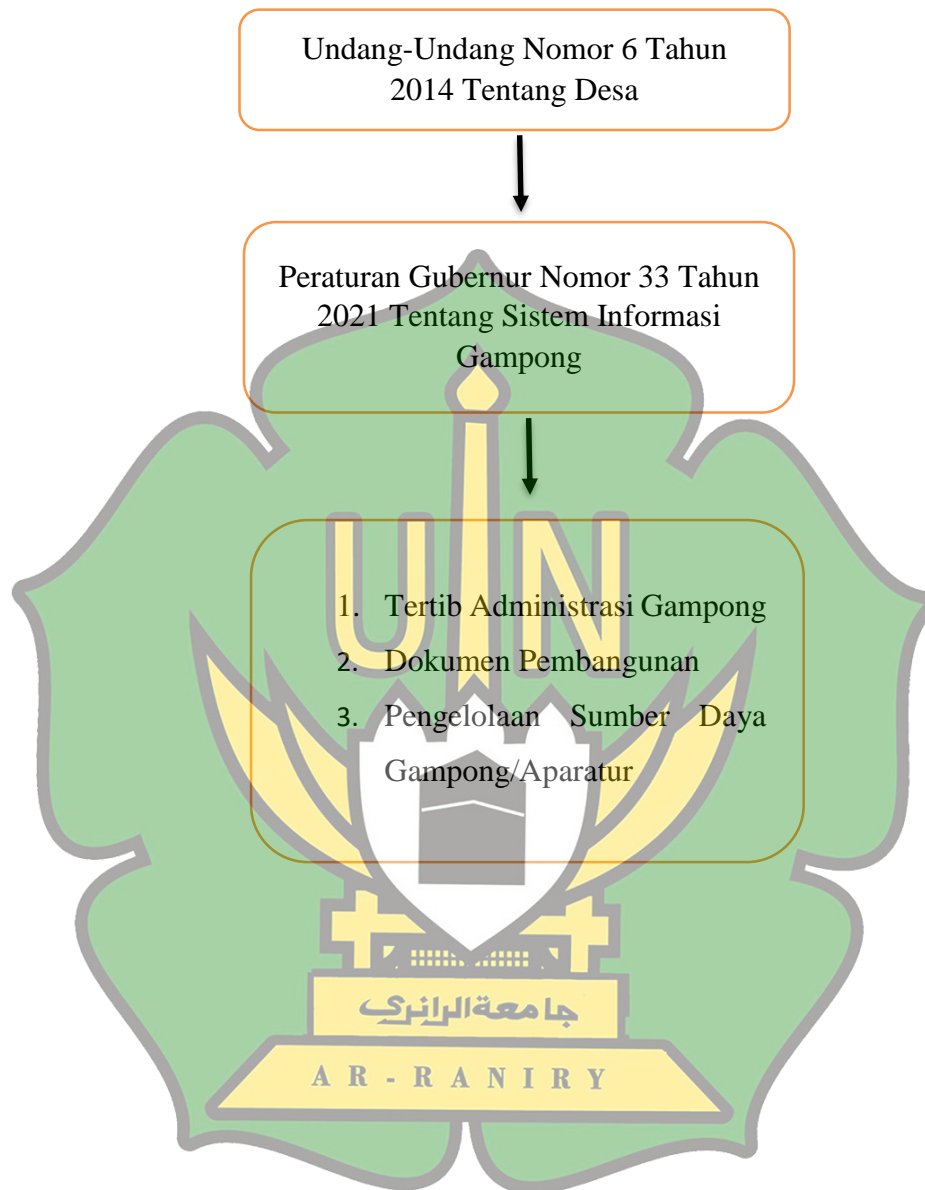
optimalisasi pelayanan, pengaruh Masyarakat Gampong dan pembangunan yang dinamis.³⁰



³⁰ Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Gampong Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village," *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019* 2, no. 2 (2016): 210–29.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membutuhkan penjelasan sebuah fenomena yang mendalam dengan cara mengumpulkan data-data yang akurat dan detail dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian informasi yang didapat akan disajikan dalam bentuk penjelasan. Pendekatan deskriptif kualitatif juga menjadi landasan awal dalam penelitian ini untuk mengkaji dan mengklarifikasi seberapa jauh aparatur Gampong di Gampong Ulee Lueng dalam mengaplikasikan SIGAP.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara menyeluruh dan terbuka terhadap segala pertanyaan dari pada hanya memberikan jawaban iya atau tidak. Sugiyono mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi).³¹

³¹ Ivan Lukmanul Hakim, "BAB III Metode Penelitian," *Repository UPI, Ivan Lukmanul Hakim*, no. 3 (2020): 35–45, http://repository.upi.edu/58184/6/S_JKR_1505964_Chapter3.pdf.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi.³²

3.2 Fokus Penelitian

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya kapasitas aparatur Gampong dalam penggunaan aplikasi sistem informasi Gampong di Gampong Ulee Lueng belum berjalan dengan baik.

Tabel 3.1 Faktor Penyebab Kurang Pengoptimalan Aparatur Gampong

No	Dimensi	Indikator
1.	Kepemerintahan	a) Visi b) Misi
2.	Perencanaan	a) Administrasi Gampong b) Sumber daya Gampong/aparatur

Sumber. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021
Tentang Sistem Informasi Gampong

2. Langkah apa saja yang dilakukan oleh apataur Gampong untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi system informasi Gampong

³² Radix Prima Dewi, "Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif," no. April 2015 (2019): 31–46, <https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>.

Tabel 3.2 Langkah Pengoptimalan Aparatur Gampong

No	Dimensi	Indikator
1.	Kewenangan	a) Strategi b) Tertib Administrasi
2.	Kinerja	a) Evaluasi b) Laporan

Sumber. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021
Tentang Sistem Informasi Gampong

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Peneliti memilih lokasi ini untuk melihat sejauh mana pemerintah Gampong dalam meningkatkan kapasitas aparatur Gampongnya dan sejauh mana aparatur Gampongnya mampu dalam penggunaan aplikasi SIGAP sebagaimana mestinya.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau di dapat dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung, observasi, dan wawancara ataupun fakta yang diperoleh langsung di lapangan dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian seperti alat tulis, alat dokumentasi, dan alat perekam. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dan Masyarakat di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder ini buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukung data primer.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dianggap cukup mengetahui masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif kedudukan informan sangatlah penting, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam memecahkan masalah penelitian, karena dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek penelitian.³³

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu atau disebut dengan teknik *purposive Sampling*, guna menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan keberadaan penelitian tetap dilakukan di Kabupaten Aceh Besar. Tujuan terpilihnya sampel untuk mendapatkan informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari bagaimana Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 3.3 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan

³³ Sugiarto, "Metode Penelitian" 4, no. 1 (2016): 1–23.

1.	Keuchik	1 orang	Untuk mengetahui sejauh mana proses peningkatan kapasitas aparatur Gampong dalam penggunaan aplikasi SIGAP.
2.	Sekretraris Gampong	1 orang	Untuk mengetahui apakah terdapat hambatan dalam proses penginputan data ke SIGAP.
3.	Admin/operator	1 orang	Untuk mengetahui sejauh mana proses penginputan data ke SIGAP.
4.	Seksi Pengebangan Sistem Informasi Dan Kerjasama Gampong DPMG Aceh	1 orang	Untuk mengetahui sejauh mana DPMG dalam mensosialisasikan SIGAP ke Gampong-gampong.
5.	Masyarakat	3 orang	Untuk mengetahui sejauh mana antusias Masyarakat dengan hadirnya SIGAP ini.
	Jumlah	7 orang	

Sumber. Data diolah peneliti tahun 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam Eko Murdiyanto, Cartwright mengartikan observasi sebagai proses melihat, mengamati dan mencermati serta mencatat tingkah laku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan,

objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Setiap penelitian perlu dilakukan observasi agar dapat menyajikan gambaran realistis tentang perilaku atau peristiwa, untuk menjawab pertanyaan, untuk memahami dan mengevaluasi perilaku orang, sebagai umpan balik terhadap aspek pengukuran yang dilakukan.³⁴ Disini peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana kinerja aparatur Gampong dalam mengoperasikan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng tersebut.

Observasi dilakukan di Gampong Ulee Lueng terkait penggunaan aplikasi SIGAP. Adapun yang menjadi subjek observasi yaitu Keuchik dan beberapa aparatur Gampong dan pegawai di DPMG. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi yang berkaitan dengan topik yang ingin diamati seputar penggunaan SIGAP.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian yang berupa komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi mengenai informan yang relevan. Wawancara adalah suatu peristiwa atau proses antara pewawancara dengan sumber informasi

³⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020, [http://www.academia.edu/download/35360663/Metode Penelitian Kualitatif.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif.docx).

atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau pertanyaan langsung mengenai pokok bahasan yang diteliti.³⁵

Disini peneliti akan mewawancarai beberapa orang terkait yang bertujuan untuk melihat apakah hasil wawancara tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan narasumber lainnya. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dilihat kebenarannya dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan.

Secara umum pertanyaan dalam wawancara ini bersifat *open-ended* (terbuka) yang artinya memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab sesuai pemahaman dan pengalamannya masing-masing. Adapun beberapa pertanyaan yang akan diajukan seputar kinerja aparatur Gampong dalam peningkatan kapasitas kerja di Gampong Ulee Lueng, pemahaman aparatur Gampong terhadap aplikasi SIGAP dan bagaimana cara kerjanya, serta langkah-langkah yang akan diterapkan aparatur Gampong dalam mengenalkan dan mengajak Masyarakat mengimplementasikan aplikasi SIGAP.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Sebagian besar informasi yang tersedia adalah surat, buku harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan lain-lain. Ciri utama informasi ini adalah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga

³⁵ BAB III, "Metode Penelitian," *Oxford Art Online*, 2018, 31–38, <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>.

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dokumen merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), maupun karya monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.³⁶

Penelitian ini juga memerlukan dokumentasi sebagai data tambahan. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa rekaman dan foto pada saat pengumpulan data dilakukan. Foto dan rekaman tersebut dapat menjadi bukti bahwa peneliti sedang melakukan wawancara yang terarah saat penelitian berlangsung. Adapun hasil dari dokumentasi berbentuk foto, tulisan, rekaman dan gambar serta keterangan untuk mendukung penelitian tersebut.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat melalui berbagai teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah cara umum yang digunakan dalam penjaminan validasi data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data tersebut.³⁷

³⁶ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.

³⁷ DEWI, "Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif."

1. Triangulasi sumber data adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi dan siang hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Gampong Ulee Lueng

Gambar 4.1 Peta Wilayah Gampong Ulee Lueng



Sumber. Peta Wilayah Gampong Ulee Lueng

Gampong Ulee Lueng berada dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah. Menurut sejarah pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia, Gampong Ulee Lueng berasal dari dua kata yaitu Ulee dan Lueng, Ulee yang berarti kepala dan Lueng yang artinya drainase atau got yang digunakan untuk mengairi sawah pada musim tanam padi sampai ke Gampong Lambheu dan juga Gampong Lhong cut. Oleh karena itu Masyarakat pada saat itu memberi nama Ulee Lueng.

Secara administratif posisi Gampong Ulee Lueng pada saat sekarang berada dalam Kecamatan Darul Imarah yang berjarak dari pusat Kecamatan lebih kurang 2,5 km yang pada umumnya warga Gampong ulee leung bekerja

dibidang pertanian baik sebagai petani, peternak, dan hanya sebagian kecil yang bekerja diluar bidang pertanian seperti, pegawai negeri sipil, pedagang, dan guru.

Kondisi demografis Gampong Ulee Lueng meliputi yaitu jumlah penduduk mencapai 970 jiwa, dengan jumlah laki-laki 504 jiwa dan perempuan berjumlah 466 jiwa. Jumlah KK 215 yang tersebar ke dalam 3 (tiga) dusun yaitu jeurat jeumpa, po intan, dan meurah dua. Terdapat beberapa aset Gampong Di Gampong Ulee Lueng Ini seperti peternakan sapi, kompleks rumah sewa, dan badan usaha milik Gampong (BUMG) yang dikelola oleh Masyarakat setempat.

Dilihat dari letak geografis Gampong, Gampong Ulee Lueng adalah salah satu dari bagian Pemerintahan Kecamatan Darul Imarah dengan batas-batas Gampong sebagai berikut:³⁸

Tabel 4.1 Batas-Batas Gampong Ulee Lueng

Batas	Gampong	Kecamatan
Sebelah Utara	Dusun Aron Gampong Gue Gajah	Darul Imarah
Sebelah Selatan	Ulee Tuy	Darul Imarah
Sebelah Timur	Kandang Cut	Darul Imarah
Sebelah Barat	Gue Gajah	Darul Imarah

Sumber. Data RPJM Gampong Ulee Lueng

³⁸ Data RPJM Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

b. Visi Gampong Ulee Lueng

Terwujudnya Masyarakat Gampong Ulee Lueng yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bertumpu dalam bidang pertanian serta penguatan ekonomi kerakyatan pada tahun 2019 dengan dukungan sistem pemerintahan yang profesional dalam pranata sosial yang beradab, setara, dan berkeadilan.³⁹

c. Misi Gampong Ulee Lueng

1. Menyelenggarakan pemerintahan Gampong yang bersih
2. Memberdayakan potensi Gampong yang ada
3. Memperkuat keutuhan hubungan diantara semua warga Gampong Ulee Lueng sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan di Gampong Ulee Lueng agar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil tepat guna.

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Warga Gampong Ulee Lueng

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	15 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	43 orang
3.	Nelayan	2 orang
4.	Pedagang Barang Kelontong	5 orang
5.	Montir	1 orang
6.	Dokter Swasta	1 orang
7.	Perawat Swasta	1 orang

³⁹ Data RPJM Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

8.	Bidan Swasta	2 orang
9.	TNI	2 orang
10.	POLRI	18 orang
11.	Pengusaha Kecil, Menengah, Dan Besar	1 orang
12.	Guru Swasta	2 orang
13.	Dosen Swasta	2 orang
14.	Pedagang Keliling	10 orang
15.	Tukang Kayu	22 orang
16.	Tukang Batu	9 orang
17.	Karyawan Swasta	21 orang
18.	Karyawan Pemerintah	5 orang
19.	Wiraswasta	85 orang
20..	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	8 orang
21.	Belum Bekerja	149 orang
22.	Pelajar	254 orang
23.	Ibu Rumah Tangga	209 orang
24.	Pensiunan	6 orang
25.	Buruh Harian Lepas	12 orang
26.	Sopir	4 orang
27.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	3 orang
28.	Karyawan Honorer	9 orang
29.	Tukang Cukur	3 orang

30.	Pemuka Agama	4 orang
31.	Apoteker	1 orang

Sumber. Data Prodeskel Bina Pemdes Gampong Ulee Lueng

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Di Gampong Ulee Lueng

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	2 orang
2.	Belum tamat SD	110 orang
3.	Tamat SD	105 orang
4.	SMP	80 orang
5.	SMA	230 orang
6.	Diploma 1 dan 2	6 orang
7.	Diploma 3	20 orang
8.	Diploma 4/ strata 1	34 orang
9.	Strata 2	3 orang

Sumber. Data Prodeskel Bina Pemdes Gampong Ulee Lueng

Tabel 4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ulee

Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

جامعة الرانيري

Periode 2019-2024

A R - R A N I R Y

No	Nama	Jabatan
1.	Bukhari	Keuchik
2.	Tgk. Agustiawan	Imum Meunasah
3.	Hafizullah	Sekretaris Gampong
4.	Nurul Azmi	Operator
5.	Sofyan	Tuha Peut

6.	Hasbi	Wakil Tuha Puet
7.	Junaidi, MH	Sekretaris Tuha Peut
8.	Manzahri	Anggota Tuha Peut
9.	M. Amin	Anggota Tuha Peut
10.	Muhajir	Kasi Pemerintahan
11.	M. Nur. J	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
12.	M. Saidi	Kaur Umum dan Perencanaan
13.	M. Yusuf	Kaur Keuangan
14.	M. Yusuf. A	Kadus Jeurat Jeumpa
15.	Muhibuddin	Kadus Meurah Dua
16.	Nurdin	Kadus Po Intan

Sumber. Data RPJM Gampong Ulee Lueng

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh

Seirama dengan perkembangan IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) dalam Pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, pelaksanaan pembangunan Gampong yang menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri telah beberapa kali mengalami perubahan baik perkembangan, maupun kebijakan yang menyangkut nama maupun instansi penyelenggaraannya.

Berdasarkan rangkaian laporan yang disusun oleh rombongan *Study Tour* dan *Expert* dari PBB, maka Pemerintah mendapatkan gambaran yang

jelas tentang maksud dan arti *Community Development*. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II (24 Maret – 9 April 1957), program Pemerintah yang berjangka 5 tahun mulai mencantumkan Program Pembangunan Masyarakat Gampong.

Dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966) yang terkenal dengan Kabinet 100 Menteri, berdasarkan Keputusan Presiden no. 215 tahun 1964, Pembangunan Masyarakat Gampong mendapat tempat terhormat yaitu dengan ditingkatkan kedudukannya, dari Direktorat Jenderal menjadi salah satu Departemen, yaitu Departemen PMD dibawah Kompartemen Pertanian dan Agraria.

Kedudukan PMD dalam Kabinet Ampera berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Gampong (PMD) yang tetap dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, dipimpin oleh H. Aminuddin Aziz dengan sebutan Direktur Jenderal PMD bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Direktorat Pembangunan Masyarakat Gampong (PMD) awalnya merupakan institusi dekonsentrasi yang sudah ada semenjak periode orde lama (1950-1965) dan berlanjut pada periode orde baru (1966-1998). Diawal orde baru ini barulah berada di bawah Departemen Dalam Negeri (sebelumnya: di bawah Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Gampong).

Pada Kabinet Ampera 25 Juli 1966 - 19 Oktober 1967 di Pusat bernama: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Gampong (Dirjen PMD) Dep.

Dalam Negeri, sebutan di Provinsi yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat Gampong Tingkat I. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 tahun 1972 sebutan di Provinsi menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Gampong Provinsi, dan sebutan di Kabupaten/Kotamadya yaitu Sub. Direktorat Pembangunan Masyarakat Gampong Kabupaten/Kotamadya.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Kepmendagri No.135 Tahun 1978 sebutan di pusat yaitu Direktorat Pembangunan Gampong (Ditjen Bangdes) Dep. Dalam Negeri, sebutan di Provinsi yaitu Direktorat Pembangunan Gampong (Ditbangdes) Provinsi, sedangkan sebutan di Kabupaten/Kotamadya yaitu Kantor Pembangunan Gampong (Bangdes) Kabupaten/ Kotamadya.

Berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1992 dan Kepmendagri No. 92 tahun 1992 berubah menjadi di pusat yaitu Direktorat Pembangunan Masyarakat Gampong (Ditjen PMD) Dep. Dalam Negeri, di Provinsi: Kantor Pembangunan Masyarakat Gampong (PMD) Tk. I, dan di Kabupaten/Kotamadya: Kantor Pembangunan Masyarakat Gampong (PMD) Kabupaten/Kotamadya Tk. II. Tahun 1993 berdasarkan Kepmendagri No. 80 tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 jo. Persetujuan Menpan No. B.869/I/93 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Pembangunan Masyarakat Gampong Tk. I dan Tk. II diserahkan urusannya menjadi urusan daerah.

Berdasarkan Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kantor Pembangunan Masyarakat

Gampong (PMD) Tk. I berubah namanya menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.⁴⁰

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh

Adapun visi dan misi dari dinas pemberdayaan Masyarakat dan Gampong aceh yaitu:⁴¹

Visi:

1. Islami, Masyarakat Aceh yang Islami dicirikan dengan terlaksananya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam semua sendi kehidupan dan terciptanya kerukunan hidup beragama.
2. Maju, kondisi Masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di segala bidang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
3. Damai, sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan

⁴⁰ <https://DPMG.acehprov.go.id/>

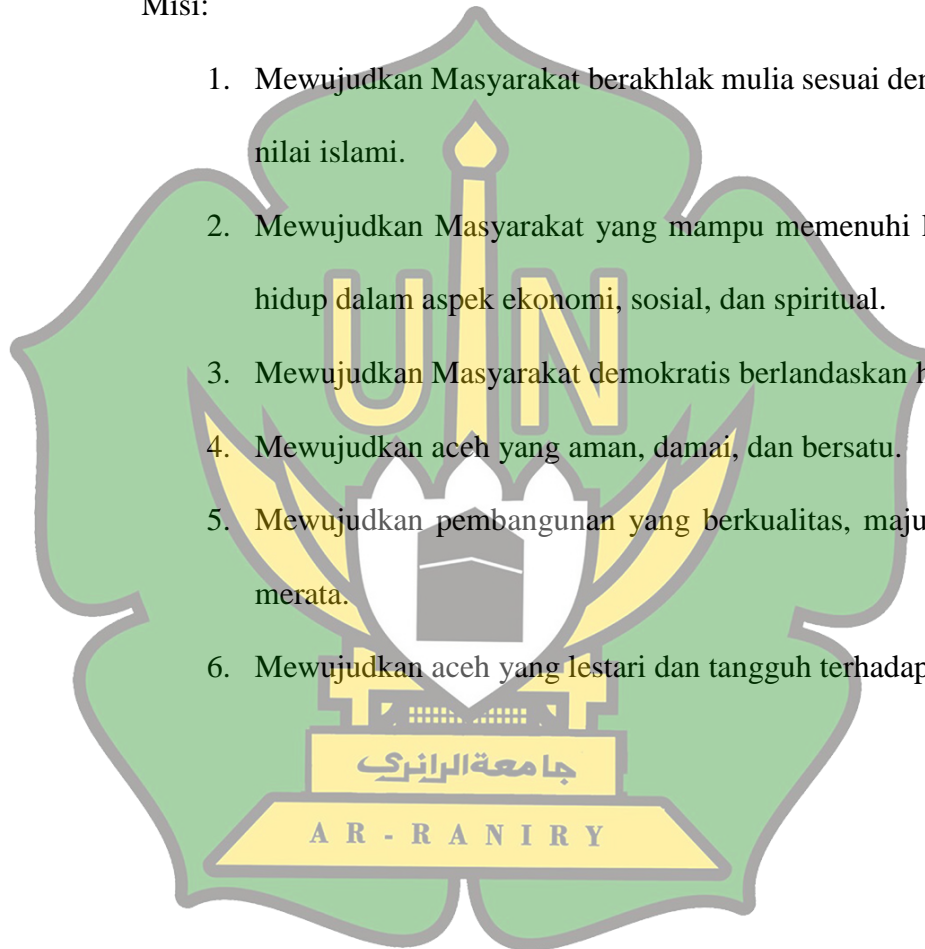
⁴¹ <https://DPMG.acehprov.go.id/>

sosial, politik, dan ekonominya, dengan baik serta memiliki rasa aman.

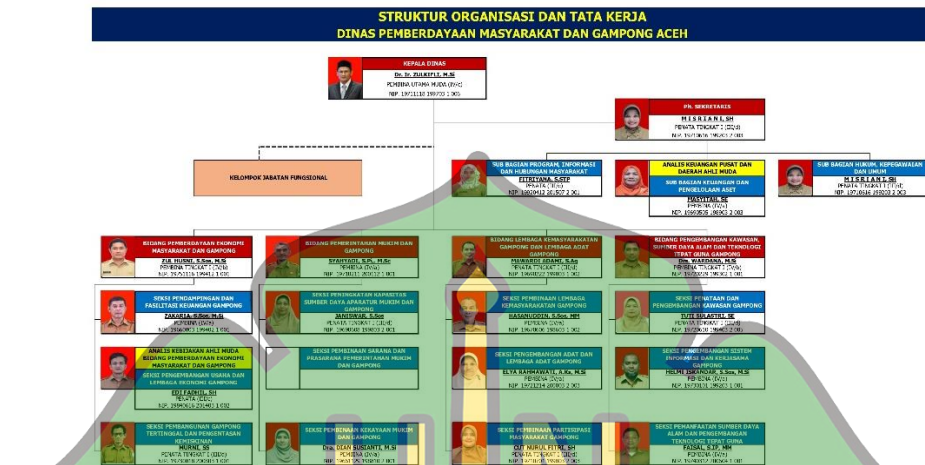
4. Sejahtera, sebuah kondisi yang diharapkan setiap Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual.

Misi:

1. Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai islami.
2. Mewujudkan Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.
3. Mewujudkan Masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan aceh yang aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata.
6. Mewujudkan aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh



Sumber. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja DPMG Aceh

4.2.3 Latar Belakang Tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Pada tahun 2018-2019, KOMPAK bersama DPMG Aceh dan KOMINSA Aceh mengembangkan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) versi 1.1 dan 1.5 untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Gampong, administrasi Gampong dan supra Gampong. Pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong pada bagian ketiga pasal 86 yaitu Sistem Informasi Pembangunan kawasan dan Perkampungan.

Pengembangan dan perluasan penggunaan aplikasi akan terus dilakukan oleh DPMG Aceh dan Diskominsa Aceh hingga tahun 2020, dengan komitmen untuk meningkatkan fungsi dan manfaat yang tersedia bagi pemerintah Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Aceh

melalui pengembangan kembali aplikasi SIGAP Aceh dari versi 1.5 menjadi versi 1.7.5. Pengembangan ini mengoptimalkan menu, sub menu, fitur, dan dataset melalui impor data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Pembangunan Gampong (SIPEDE), serta integrasi data kependudukan dari Sistem Informasi Pembangunan Gampong berbagi pemanfaatan data. Layanan Pendaftaran Penduduk Aceh (DRKA) telah dimasukkan ke dalam aplikasi SIGAP versi 1.7.5 dan terus melakukan proses optimalisasi layanan kepada Masyarakat.⁴²

Berkembangnya menu, sub menu, fitur, dataset, dan template yang tersedia pada aplikasi SIGAP versi 1.7.5 mengakibatkan adanya perubahan pada panduan/manual penggunaannya. Untuk membantu Kabupaten/Kota dan pengguna di semua level pengguna aplikasi SIGAP versi 1.7.5, disediakan panduan penggunaan yang mudah digunakan bagi perangkat Gampong/Gampong sangat bagus dalam memahami alur, tampilan setiap halaman, dan fungsi dari semua fitur yang tersedia.

Panduan Penggunaan Aplikasi SIGAP Versi 1.7.5 memiliki empat tingkatan pengguna yaitu Pengurus Gampong/Gampong, Pengurus Kecamatan, Pengurus Kabupaten/Kota (DPMG), dan Pengurus Provinsi (DPMG Aceh). Panduan ini akan menjelaskan secara rinci tentang alur, tampilan, dan fungsi seluruh fitur yang tersedia di Admin Gampong/Gampong SIGAP versi 1.7.5.⁴³

⁴² Login Siswa, "Panduan Manual Penggunaan SIGAP Domain Gampong," 2010, 1–10.

⁴³ Siswa.

Pada dasarnya Gampong tidak memiliki data dan informasi, perencanaan Gampong yang disusun belum berbasis data dan bukti, belum tersedianya media publikasi terhadap potensi yang dimiliki oleh Gampong, dan belum tersedianya media untuk pemadanan data sektor, oleh Gampong.

Mengapa harus SIGAP karena Mendukung program Aceh Hebat (Sistem Informasi Aceh Terpadu - SIAT), mendukung optimalisasi fungsi Kecamatan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Gampong serta koordinasi penyelenggaraan layanan dasar di Kecamatan, mengintegrasikan data dan informasi ditingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan sebagai media penyediaan data dan informasi dalam pelaksanaan MUSRENBANG baik ditingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.

Penerapan SIGAP pemerintah Aceh oleh DPMG Aceh yaitu mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIGAP di Kabupaten/Kota dan Gampong, kemudian memberikan pembinaan terhadap pengelola SIGAP di Kabupaten/Kota dan Gampong, menyusun SOP & tata cara penerapan SIGAP, memberikan Informasi pada Gampong menyangkut sistem dan mekanisme pengelolaan SIGAP, dan peningkatan kapasitas bagi pelatih di Provinsi dan Kabubapten/Kota. Dan penerapan SIGAP oleh DISKOMINSA Aceh yaitu mengembangkan aplikasi SIGAP, melakukan pemeliharaan berkala aplikasi SIGAP, memfasilitasi pengembangan jaringan internet lebih merata, melakukan integrasi data dan informasi dengan sistem informasi yang ada di tingkat Pusat, Aceh, dan Kabupaten/Kota, kemudian

mengembangkan keamanan sistem dan data base, terima masukan dan rekomendasi tertulis dari Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SIGAP, peningkatan kapasitas terhadap admin sistem di Kabupaten/Kota, perbaikan apabila terjadi kerusakan sistem aplikasi SIGAP.

Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan aplikasi SIGAP yaitu:

1. Banyaknya data sektor yang tersedia saat ini;
2. Kesulitan mendapatkan akses berbagi pakai data dari sektor lainnya;
3. Data dan informasi yang dikelola dan disimpan oleh pemerintah Gampong belum menjadi rujukan bagi pemerintah atasan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan; dan
4. Banyaknya proses pendataan yang dilakukan oleh parapihak, namun data tersebut tidak menjadi milik Gampong.

Tujuan dari SIGAP yaitu mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari sistem informasi, pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik untuk mendukung pembangunan dan pelayanan yang berkualitas.⁴⁴

Tabel 4.5 Susunan Personalia Tim Pelaksana Kegiatan

Sistem Informasi Gampong Tahun 2022

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Aceh	Pengarah

⁴⁴ Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh Pada Tanggal 28 Mei 2024.

2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	Ketua
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	Sekretaris
4.	Kepala Bappeda Aceh	Anggota
5.	Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Aceh	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Aceh	Anggota

Sumber. Keputusan Gubernur Aceh 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Informasi Gampong Tahun 2022

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Aceh Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan SIAT adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, dan Aceh cerdas yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan Masyarakat Aceh. Fungsi dari SIAT sendiri yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong untuk pembangunan dan pelayanan Masyarakat.⁴⁵

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa SIAT bertujuan:⁴⁶

- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi;

⁴⁵ “Qanun Aceh No. 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu.”

⁴⁶ “Qanun Aceh No. 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu.”

- b. Mengelola satu data pembangunan dan pelayanan yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pelayanan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dan Pemerintah Gampong;
- c. Meningkatkan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, mudah, tepat, dan terbaru; dan
- d. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan Aceh cerdas yang berkelanjutan.

4.2.4 Faktor Yang Menyebabkan Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng.

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) merupakan sebuah aplikasi yang mempunyai fungsi untuk menginput data-data Gampong yang dipegang oleh aparatur Gampong. Tetapi terdapat permasalahan dalam proses penginputan data ke SIGAP yang mana operator belum cukup terampil dalam mengoperasikan SIGAP, sehingga operator tidak bisa lebih leluasa dalam mengoperasikan SIGAP. Umumnya SIGAP di Gampong Ulee Lueng biasanya dikelola oleh sekretaris Gampong. Pada dasarnya SIGAP dikembangkan untuk bisa mengetahui berapa banyak Masyarakat yang kurang mampu, disabilitas dan juga SIGAP gunanya untuk melihat perencanaan dan pembangunan Gampong kedepannya. Salah satu tujuan dari SIGAP yaitu untuk menyusun perencanaan Gampong seperti keuangan Gampong, APBG dan lain sebagainya.

Umumnya semua pemerintahan mempunyai empat fungsi utama, yaitu pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan. Untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat luas, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan secara kooperatif dan optimal. Gampong yang melambangkan media pemerintah pusat serta media pemerintah daerah adalah ujung tombak untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut. Namun berdasarkan apa yang telah dikemukakan, kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut belum berjalan seperti yang telah direncanakan. Hingga saat ini, Gampong belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan perkembangan, Masyarakat Gampong yang masih tertinggal menyebabkan rendahnya sumber daya manusia yang ada di Gampong terutama di aparturnya.⁴⁷

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan aplikasi sistem informasi Gampong belum optimal dilakukan oleh aparatur Gampong Ulee Lueng:

1. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam menggunakan aplikasi SIGAP tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ulee Lueng Tentang Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong menjelaskan bahwa:

”Saya melihat aparatur Gampong khususnya operator dan sekretaris Gampong dalam mengoperasikan SIGAP ini kurang mahir atau belum mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi SIGAP.

⁴⁷ Proposal Skripsi, “Strategi Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Gampong Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh,” 2022, 1–13.

Masyarakat belum mengenal adanya aplikasi SIGAP ini, kemudian dengan pengadaan kuliah pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik ini belum sepenuhnya efektif yang bisa membantu aparaturnya Gampong dalam penginputan data ke SIGAP. Kapasitas aparaturnya Gampongnya sudah mengarah ke yang cukup baik walaupun masih memiliki sedikit kekurangan di bidang sarana dan prasarana kemudian dalam hal perkembangan teknologi dan kinerja aparaturnya belum cukup maksimal sehingga membutuhkan pemahaman yang mengarah kepada teknologi. Dari segi pelatihan kami sangat jarang membuatnya karena jika merasa itu kurang bermanfaat maka tidak dibuat. Biasanya pun yang membuat pelatihan itu dari Kabupaten atau Kecamatan, kalau dari Gampong belum pernah”.⁴⁸

Pada masa pemerintahan Keuchik Gampong Ulee Lueng sekarang menyatakan bahwa kapasitas aparaturnya Gampongnya sudah mengarah ke yang cukup baik walaupun masih memiliki sedikit kekurangan di bidang sarana dan prasarana, kemudian sumber daya manusianya dalam hal perkembangan teknologi dan kinerja aparaturnya yang belum cukup maksimal sehingga membutuhkan pemahaman yang mengarah kepada teknologi.

2. Terdapat kendala dalam proses penginputan data ke SIGAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Ulee Lueng menjelaskan bahwa:

“Aplikasi SIGAP ini sering kali terjadi *down server* atau *error* ketika digunakan sehingga ketika ingin menginput data ke SIGAP tidak mau masuk atau tersimpan. Mungkin permasalahannya ada di web SIGAP sendiri. Biasanya saya update data 3 bulan sekali. Saran dan harapan kepada pihak DPMG dan KOMINSA untuk mengupgrade aplikasi SIGAP karena aplikasi ini digunakan untuk mempermudah administrasi Gampong tapi aplikasi tersebut tidak bisa digunakan.”⁴⁹

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 22 Mei 2024.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Sekretris Gampong Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 27 Mei 2024.

3. Kurangnya perhatian aparat Gampong terhadap penggunaan aplikasi SIGAP.

Kemudian di lanjutkan wawancara dengan Operator Gampong Ulee

Lueng menjelaskan bahwa:

“Untuk mengoperasikan aplikasi SIGAP ini kalau secara langsung belum pernah untuk input data, biasanya yang menginput dan memperbarui data ke SIGAP itu sekretaris Gampong. Saya belum fokus untuk mengoperasikan SIGAP karena ada hal lain yang saya kerjakan, tapi saya akan belajar bagaimana cara menginput data ke SIGAP tersebut.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa operator di Gampong Ulee Lueng tidak begitu antusias untuk mengoperasikan SIGAP, dan tidak pernah ingin tahu bagaimana proses pembaruan informasi yang diupload ke SIGAP. Hanya sekretaris Gampong yang sering mengakses SIGAP dan mencoba untuk memperbarui data Gampong. Akan tetapi selalu terjadi masalah dalam proses penginputan data, hal ini yang menjadikan operator dan sekretaris Gampong tidak begitu memperdulikan lagi dengan aplikasi SIGAP tersebut.

Pelatihan yang pernah diikuti oleh operator yaitu tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang bertugas untuk melakukan input data dan memperbarui data kemiskinan yang ada di setiap Gampong. Kemudian pelatihan selanjutnya yang pernah diikuti oleh operator Gampong kurang lebih seperti seminar yang mana lebih mengarah untuk menambah wawasan tentang Gampong setiap tahunnya.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Operator Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 27 Mei 2024.

4. Kurangnya kesadaran aparatur Gampong betapa pentingnya penggunaan aplikasi SIGAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Pengebangan Sistem Informasi Dan Kerjasama Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menjelaskan bahwa:

“DMPG sudah memberikan pelatihan kepada operator Gampong tentang bagaimana proses penginputan data, seharusnya setelah dilatih tugas operator melanjutkan tetapi karena adanya beberapa keterbatasan sehingga pihak DPMG membuat lagi pelatihan tersebut. Jika terdapat kendala dalam masalah penginputan data ke SIGAP, aparatur Gampong bisa melaporkan masalah-masalah yang terjadi secara bertahap ke pihak DPMG secara langsung. Kemudian dilihat lagi bagaimana kemampuan kapasitas dari aparatur Gampong khususnya operator dalam mengoperasikan SIGAP ini terutama dalam hal penginputan data. Harapannya dengan adanya aplikasi SIGAP ini Gampong-gampong secara langsung maupun tidak langsung bisa memperbaiki administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, administrasi perencanaan yang dilaksanakan di Gampong sampai dengan ke pusat, salah satu kunci utamanya adalah data. Jika tidak ada data, maka tidak bisa berbicara tentang perencanaan, keuangan orang miskin dan lain sebagainya.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DPMG Aceh sudah memberikan pelatihan kepada operator Gampong, akan tetapi dari pihak operatornya sendiri kurang terampil untuk mengaplikasikannya. Dalam rangka mengembangkan SIGAP untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menyangkup administrator sistem di tingkat Provinsi, DPMG akan mengadakan *Training of Trainers* (ToT) untuk Kabupaten supaya bukan hanya DPMG saja yang bisa melakukannya, tapi Kabupaten juga harus mampu memberikan kepada Gampong. Pengambilan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Seksi Pengebangan Sistem Informasi Dan Kerjasama Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Pada Tanggal 28 Mei 2024.

sampel awal dalam pelatihan aplikasi SIGAP ini yaitu di tingkat Kabupaten seperti Aceh Barat, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah.

DPMG juga melakukan kerja sama dengan berbagai Universitas yang ada di Aceh salah satunya Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk membantu para aparat Gampong dalam proses penginputan data ke SIGAP. Kemudian DPMG juga melakukan kerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh (Diskominfo) untuk memfasilitasi aplikasi SIGAP yang mana diskominfo menyusun menu-menu data yang diperlukan untuk di input ke SIGAP sehingga setiap tahun adanya pembaruan fitur-fitur yang ada di aplikasi SIGAP dan akan berubah sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan di Gampong.

Kemudian dalam penginputan data SIGAP tidak adanya target yang dicapai oleh masing-masing Gampong, hanya saja aparatur Gampong diharapkan untuk mengisi data sebanyak mungkin yang diperlukan, jika tidak maka pihak DPMG yang akan mendapatkan teguran langsung dari Bupati.

Harapan DPMG kepada aparatur Gampong agar setelah melakukan pelatihan yang diberikan oleh DPMG operator bisa melanjutkan di Gampong tapi nyatanya tidak, dan apabila Gampong mengalami kendala DPMG siap untuk membantu.

5. Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam hadirnya SIGAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat Gampong Ulee Lueng menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh aparatur Gampong sudah cukup baik, saya belum pernah mengetahui atau mendengar tentang

aplikasi SIGAP kemudian fasilitas yang ada di kantor keuchik sudah memadai walaupun masih banyaknya kekurangan. Masih terdapat keluhan Masyarakat terhadap pelayanan aparat Gampong tentang mengurus surat dan pemberkasan lain yang memakan waktu kurang lebih 2x 24 jam, bantuan yang sering diberikan oleh aparatur Gampong seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan khusus janda. Harapannya untuk sekarang semoga jalannya segera diperbaiki dan semoga Gampong ini ter”us maju lagi kedepannya.”⁵²

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan salah satu Masyarakat

Gampong Ulee Lueng menjelaskan bahwa:

“Saya kurang mengetahui apa itu SIGAP kemudian pelayanan yang diberikan oleh aparatur Gampong juga sudah cukup baik dan fasilitas yang ada di kantor juga sudah memadai, pelayanan yang sering diberikan oleh aparatur Gampong kepada Masyarakat itu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Harapannya semoga Gampong Ulee Lueng ini harus lebih baik dari yang sebelumnya.”⁵³

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan salah satu Masyarakat

Gampong Ulee Lueng menjelaskan bahwa:

“Sebelumnya belum pernah mendengar tentang aplikasi SIGAP, kemudian pelayanan yang diberikan aparatur Gampong kepada Masyarakat sudah bagus tapi tetap saja masih memiliki kendala saya kira itu hal yang wajar, dan fasilitas yang ada di kantor juga sudah memadai, bantuan yang diberikan kepada Masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan khusus janda. Harapannya Gampong ini dapat lebih maju lagi dalam semua bidang.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa umumnya Masyarakat di Gampong Ulee Lueng tidak mengetahui adanya

⁵² Hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 27 Mei 2024.

⁵³ Hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 27 Mei 2024.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 27 Mei 2024.

SIGAP karena aparaturnya Gampong belum mensosialisasikan kepada Masyarakat, kemudian dalam segi pelayanan Masyarakat merasa adanya sedikit kekurangan dan fasilitasnya pun belum sepenuhnya memadai. Melihat dari observasi langsung Gampong Ulee Lueng, Masyarakatnya memang kurang antusias dalam proses perkembangan Gampongnya dengan kondisi Gampong yang belum terlalu maju, Masyarakat berharap kedepannya Gampong ini bisa menjadi Gampong yang lebih baik lagi dan setara dengan Gampong-gampong yang ada disekitarnya dengan fasilitas yang cukup dan pelayanan yang diberikan juga lebih baik.

Banyak orang yang tidak mengetahui tentang Gampong Ulee Lueng karena kondisi Gampong yang masuk ke dalam dan penduduknya pun tidak begitu ramai, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gampong Ulee Lueng adalah Gampong yang mana Masyarakatnya tidak peduli dengan keadaan setempat.

Dalam hal administrasi Gampong dan sumber daya manusianya, Gampong Ulee Lueng masih sangat tertinggal dengan Gampong-gampong disekitarnya yang sudah maju dengan kinerja aparaturnya yang sangat baik kemudian sarana dan prasarana yang sudah memadai. Di Gampong Ulee Lueng tingkat kepekaan aparaturnya Gampong dan Masyarakatnya tentang SIGAP saja masih kurang padahal ini bisa memudahkan Masyarakat dan aparaturnya Gampong dalam hal pengumpulan data, pembaruan informasi, dan perencanaan.

Pemerintahan Gampong mempunyai keunggulan yang sangat signifikan dalam proses sosial pembangunan Masyarakat. Tugas terpenting pemerintah Gampong adalah memikirkan bagaimana mengembangkan Masyarakat demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik agar Masyarakat dapat hidup damai, sejahtera, aman, tentram, dan berkeadilan.

Aspek yang paling penting dalam peningkatan kapasitas aparatur Gampong di Aceh secara umum peningkatan kapasitas sebuah pelayanan dapat berjalan dengan baik apabila kapasitas aparatur Gampongnya kompeten dibidangnya. Kemudian pelayanan administrasi di tingkat Gampong pun jauh dari kata memuaskan dimana belum memadainya kapasitas aparatur Gampong dalam memberikan layanan kepada Masyarakat sehingga kesejahteraan Masyarakat menjadi terhambat.

Peningkatan kapasitas aparatur Gampong merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan prima untuk kepentingan Masyarakat dalam memberikan pelayanan administrasi di tingkat pemerintahan Gampong. Dalam menjalankan fungsinya memberikan bantuan kepada Masyarakat umum, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah untuk menciptakan pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah.⁵⁵

⁵⁵ Service, "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Keude Jrat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara."

Selama masa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik pada tanggal 28 Agustus sampai 29 September 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, peneliti melihat antusias perangkat gmpong terhadap aplikasi SIGAP sangat kurang tidak seperti Gampong lain disekitarnya.

Kemudian DPMG dan LP2M telah mengupayakan untuk penggunaan SIGAP, namun partisipasi dari pihak aparatur Gampong dan Masyarakatnya tidak ada, harapan dari DPMG dan LP2M sangat besar kepada aparatur Gampong agar SIGAP bisa digunakan dengan baik kedepannya.

4.2.5 Langkah-Langkah Yang Diperlukan Aparatur Gampong Dalam Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada era globalisasi dan modernisasi saat ini aparatur Gampong memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan kondisi yang ada di Gampongnya. Aparatur Gampong seperti kepala Gampong, sekretaris Gampong, operator, dan aparatur Gampong lainnya bertanggung jawab atas berbagai aspek di bidang pemerintahan dan pembangunan di tingkat Gampong, karena peningkatan aparatur Gampong sendiri merupakan suatu keharusan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat itu berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan, dan kemandirian Gampong secara menyeluruh.

Langkah-langkah yang harus dilakukan aparatur Gampong dalam mengoptimalkan SIGAP menurut Keuchik Gampong Ulee Lueng menjelaskan bahwa:

Di dalam rapat selalu menyampaikan kepada aparatur Gampong bahwa ada sistem terbaru yang ada di Gampong, selebihnya bagaimana aparatur Gampong dalam mencari informasi tentang SIGAP tersebut.

Jadi langkah yang harus diperlukan oleh aparatur Gampong dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIGAP yaitu:⁵⁶

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan

Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Gampong dalam berbagai bidang.

Di Gampong Ulee Lueng pada bulan juli tahun 2024 akan mengadakan pelatihan tentang peningkatan kapasitas aparatur Gampong yang diselenggarakan oleh Kabupaten, yang akan ikut serta dalam pelatihan ada bendahara, tuha peut, sekretaris desa, dan keuchik. Tetapi inisiatif untuk membuat pelatihan ditingkat Gampong aparatur Gampong Ulee Lueng belum pernah menyelenggarakannya.

2. Melakukan pemberdayaan komunitas lokal

Melibatkan Masyarakat dalam proses pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur Gampong sehingga terciptanya sinergi antara pemerintah Gampong dengan Masyarakat dalam membangun Gampong.

⁵⁶ <https://lpkn.org/2024/02/29/peningkatan-kapasitas-aparatur-Gampong-manfaat-strategi-dan-tantangannya/>

Di Gampong Ulee Lueng belum terlalu antusias dalam pemberdayaan komunitas lokal karena tergantung kearifan lokal Gampong Ulee Lueng sendiri, karena kalau tidak dibutuhkan oleh Masyarakat aparaturnya Gampong tidak akan mengadakan pemberdayaan tersebut, kemudian apabila pelatihan yang memang diperlukan oleh Masyarakat baru diadakannya pelatihan tersebut. Sekiranya tidak bermanfaat untuk Masyarakat maka pemberdayaan lokal tidak akan dilaksanakan di Gampong.

3. Pengembangan kepemimpinan

Mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk kepala Gampong dan aparaturnya Gampong lainnya guna untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin dan mengelola pemerintahan Gampong secara efektif.

Dalam pengembangan kepemimpinan di Gampong Ulee Lueng belum mengarahkan untuk mengadakan pengembangan kepemimpinan, bahkan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten saja tidak pernah membuat pelatihan tersebut. Kemudian inisiatif dari pihak aparaturnya Gampong sendiri tidak pernah dilakukan kecuali ada unsur untuk kepentingan dalam pengembangan kepemimpinan aparaturnya Gampong khususnya Keuchik akan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan seluruh Gampong di Kecamatan Darul Imarah tidak pernah mengadakan pelatihan hanya saja Gampong yang sudah mandiri dan maju yang membuat pelatihan seperti ini.

4. Pemanfaatan teknologi informasi

Mengadakan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi bagi aparatur Gampong agar dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pembangunan Gampong.

Meninjau dari Gampong Ulee Lueng tidak ada rencana untuk menggelar pemanfaatan teknologi kecuali ada pihak yang mau membantu untuk mendanai kegiatan tersebut baru diadakannya pelatihan pemanfaatan teknologi informasi di Gampong Ulee Lueng.⁵⁷

Selama ini perangkat Gampong semakin merasa kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsi (Tupoksi) dalam melaksanakan pekerjaannya. Akibatnya, banyak pekerjaan yang dilakukan oleh aparat Gampong kurang profesional dan tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Sementara itu, Masyarakat yang tinggal di Gampong saat ini berharap agar penyelenggaraan Gampong dapat memenuhi setiap tuntutan yang terkadang tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya aparatur Gampong yang tersedia.⁵⁸

Jadi solusi yang ditawarkan adalah aparatur Gampong di Gampong Ulee Lueng masih kurang menyadari bahwa sangat penting untuk meningkatkan penguatan kapasitas sumber daya manusianya baik dari segi manapun, dan dengan hadirnya SIGAP dapat mempermudah aparatur Gampong untuk bisa memperbaiki administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan

⁵⁷ Hasil wawancara lanjutan dengan Keuchik Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pada Tanggal 27 Mei 2024.

⁵⁸ Irma Linda, "Penguatan Kapasitas Pemerintah Gampong Di Gampong Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 4 (2019): 231–40.

administrasi perencanaan yang dilaksanakan di Gampong, karena salah satu kunci utama majunya suatu Gampong adalah data, kalau tidak ada data kita tidak bisa berbicara tentang perencanaan, keuangan data orang miskin dan lain sebagainya.

Harapannya aparatur Gampong mampu belajar secara mandiri untuk memahami tentang adanya penggunaan SIGAP, mereka harus mampu bagaimana cara mengaplikasi SIGAP khususnya operator dan sekretaris Gampong. Karena kalau mereka tidak mampu untuk menggunakan aplikasi SIGAP maka akan sangat sulit bagi mereka untuk memperbaiki data-data yang ada, karena di dalam SIGAP sudah merangkum semuanya tentang Gampong tinggal bagaimana cara Gampong itu sendiri untuk melakukannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Yang Menyebabkan Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng masih belum maksimal, karena pihak aparaturnya saja masih kurang mengerti bagaimana cara mengoperasikan SIGAP tersebut dan faktor utama belum optimalnya kapasitas aparaturnya dalam menggunakan aplikasi SIGAP yaitu karena kurangnya kesadaran dari pihak aparaturnya sendiri yang masih belum mempunyai keahlian untuk menggunakan aplikasi tersebut sehingga apabila terjadi kendala dalam menginput data ke SIGAP pihak operator tidak mau melaporkan ke pihak DPMG.
2. Langkah yang dilakukan aparaturnya dalam mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong yaitu melakukan berbagai pelatihan untuk melatih kemampuan aparaturnya dibidangnya kemudian memberikan kesempatan kepada Masyarakat dalam proses pelatihan dan pengembangan kapasitas aparaturnya. Kemudian mengadakan berbagai pelatihan kepemimpinan bagi aparaturnya untuk meningkatkan *skill* mereka dalam memimpin dan

mengelola pemerintahan Gampong secara lebih efektif lagi. Dan aparatur Gampong harus mampu untuk menggunakan aplikasi SIGAP karena akan sangat mudah bagi aparatur Gampong dalam mengolah berbagai data-data penting yang ada di Gampong.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada kepala Gampongnya agar lebih memaksimalkan kinerja aparaturnya khususnya operator dalam hal mengoperasikan SIGAP karena SIGAP ini bertujuan untuk perencanaan kedepan agar lebih baik lagi, dengan adanya SIGAP ini memudahkan aparatur Gampong dalam menginput data-data Masyarakat dan memperbarui berbagai informasi.
2. Kepada sekretaris Gampong dan operator agar lebih fokus lagi bagaimana cara mengoperasikan SIGAP, karena tugas mereka adalah untuk menginput data-data terbaru yang ada di Gampong. Jika terdapat kendala dalam menginput data ke SIGAP operator dan sekretaris Gampong segera melaporkan ke pihak DMPG, karena jika tidak melaporkan kejadian tersebut maka aparatur Gampong tidak bisa memperbarui data dan informasi dikarenakan memiliki masalah dalam proses penginputan data ke SIGAP.
3. Diharapkan kedepannya dengan hadirnya aplikasi SIGAP ini memberikan kemudahan kepada aparatur Gampong dalam proses penginputan data-data SIGAP dan dengan hadirnya SIGAP bisa memberikan bantuan kepada

Masyarakat, semoga dengan hadirnya SIGAP dapat membuat perubahan yang lebih baik lagi kedepannya untuk Gampong Ulee Lueng.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ansory, Al Fadjar, and Meithiana Indrasari. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2018. <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/891>.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx.

Siswa, Login. "Panduan Manual Penggunaan SIGAP Domain Gampong," 2010, 1–10.

Jurnal:

Barniat, Zulman, Dosen Jurusan, Ilmu Komunikasi, and Universitas Muhammadiyah. "OTONOMI GAMPONG : KONSEPSI TEORITIS DAN LEGAL" 2, no. 2 (2018): 107–20.

Crystallography, X-ray Diffraction. "Penguatan Kapasitas UMKM," 2016, 1–23.

DEWI, RADIX PRIMA. "Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif," no. April 2015 (2019): 31–46. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>.

Hapsari, Rima Adhi. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Di Gampong Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.8385>.

Kemiskinan, Mengentaskan, Titi Darmi,) Iqbal, and Miftakhul Mujtahid. "Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Gampong Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)* 3, no. 1 (2019): 547–66.

Kokotiasa, Wawan. "Jurnal Administrasi Pemerintahan Gampong, V2.II." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Gampong* 2576, no. 2 (2021): 11–23. <https://doi.org/10.32669/village>.

Linda, Irma. "Penguatan Kapasitas Pemerintah Gampong Di Gampong Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 4 (2019): 231–40.

- Lukmanul Hakim, Ivan. "BAB III Metode Penelitian." *Repository UPI, Ivan Lukmanul Hakim*, no. 3 (2020): 35–45. http://repository.upi.edu/58184/6/S_JKR_1505964_Chapter3.pdf.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Gampong Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village." *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019* 2, no. 2 (2016): 210–29.
- Priambodo, Aji, Universitas Perwira Purbalingga, and Kata Kunci. "Pengaruh Kinerja Pemerintah Gampong." *Jurnal Manajemen, Keuangan Dan Komputer* 2, no. 4 (2019): 32–42. https://jurnal.poltektriguna.ac.id/Nov2019/32_42.pdf.
- Putra, Riza Darma, and Muhamad Rosit. "Peningkatan Literasi Internet Dan Penguatan Sistem Informasi Gampong Bagi Perangkat Gampong Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor." *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 13, no. 1 (2022): 26–37. <https://doi.org/10.35814/coverage.v13i1.3518>.
- Sebuah, Kenyataan, and Tinjauan Kritis. "Pelayanan Publik Di Era Otonomi Gampong Antara Harapan Dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis)" 3, no. 2 (2019).
- Service, Indonesian Community. "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Keude Jirat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara" 4, no. 1 (2023): 356–66.
- Sofie, Fabiani, and Sisca Eka Fitria. "Identifikasi Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Usaha Menengah (Studi Pada CV. Kota Agung)." *Jurnal Wacana Ekonomi* 18, no. 1 (2018): 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/454>.
- Tauhidi, A H. "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Dana Gampong"(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kabupaten Gresik)," 2017. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6177>.
- Theodoridis, Theodoros, and Juergen Kraemer. "Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Gampong Di Gampong Oben Kabupaten Kupang" 2, no. 2 (n.d.): 335–56.

Skripsi:

Astiwi, Ana Roby. "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Studi Pada Biro Sumber Daya Manusia Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia)." *Journal Repository Universitas Brawijaya* 2, no. 89 (2018): 1–177. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162961/1/Ana Roby Astiwi.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162961/1/Ana_Roby_Astiwi.pdf).

Baharuddin dan Moh. Makin. "Baharuddin Dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam , (Malang: UIN-Maliki Press, 2010),h.61. 1," 2018, 69. <http://repository.uin-malang.ac.id/1440/>.

Ramadhon, Edo Defrian. "Kapasitas Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (Studi Di Gampong Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)" 01 (2023): 1–23.

Riau, UIN Suka. "Otonomi Gampong," 2019, 7–8.

Skripsi, Proposal. "Strategi Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Gampong Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh," 2022, 1–13.

Sugiarto. "Metode Penelitian" 4, no. 1 (2016): 1–23.

Sofyandi, Herman. "Manajemen Sumber Daya Manusia," 2008, 148.

III, BAB. "Metode Penelitian." *Oxford Art Online*, 2018, 31–38. <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Bender, Daniel. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014." *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Gampong, Sistem Informasi, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Indonesia Nomor. "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021," 2021, 2–10.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." *Bphn.Go.Id* 2003, no. 1 (2009): 3.

"Qanun Aceh No. 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu," 2020

WaliKota Banda Aceh. “Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tantang Pemerintah Gampong Pasal 1 Ayat 15,” 2019.

Artikel/ Website Resmi:


<https://DPMG.acehprov.go.id/>

<https://lpkn.org/2024/02/29/peningkatan-kapasitas-aparatur-Gampong-manfaat-strategi-dan-tantangannya/>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 176/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2024

TENTANG
PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 atas UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KM/K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan nomor PER-50/PR/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.823925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 01 Desember 2023


MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Dr. Ade Irma, B.Si., M.A. Sebagai pembimbing I
2. Cut Zamharira, S.P., M.A.P. Sebagai pembimbing II
Untuk membimbing skripsi:
Nama : Yasy Dewina
NIM : 200812107
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imerah Kabupaten Aceh Besar

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Januari 2024
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

MUJI MULIA

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-861/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
2. Gampong Ulee Lueng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : YOSSY DEWIRNA / 200802037
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Lampasah Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Mei 2024 an.

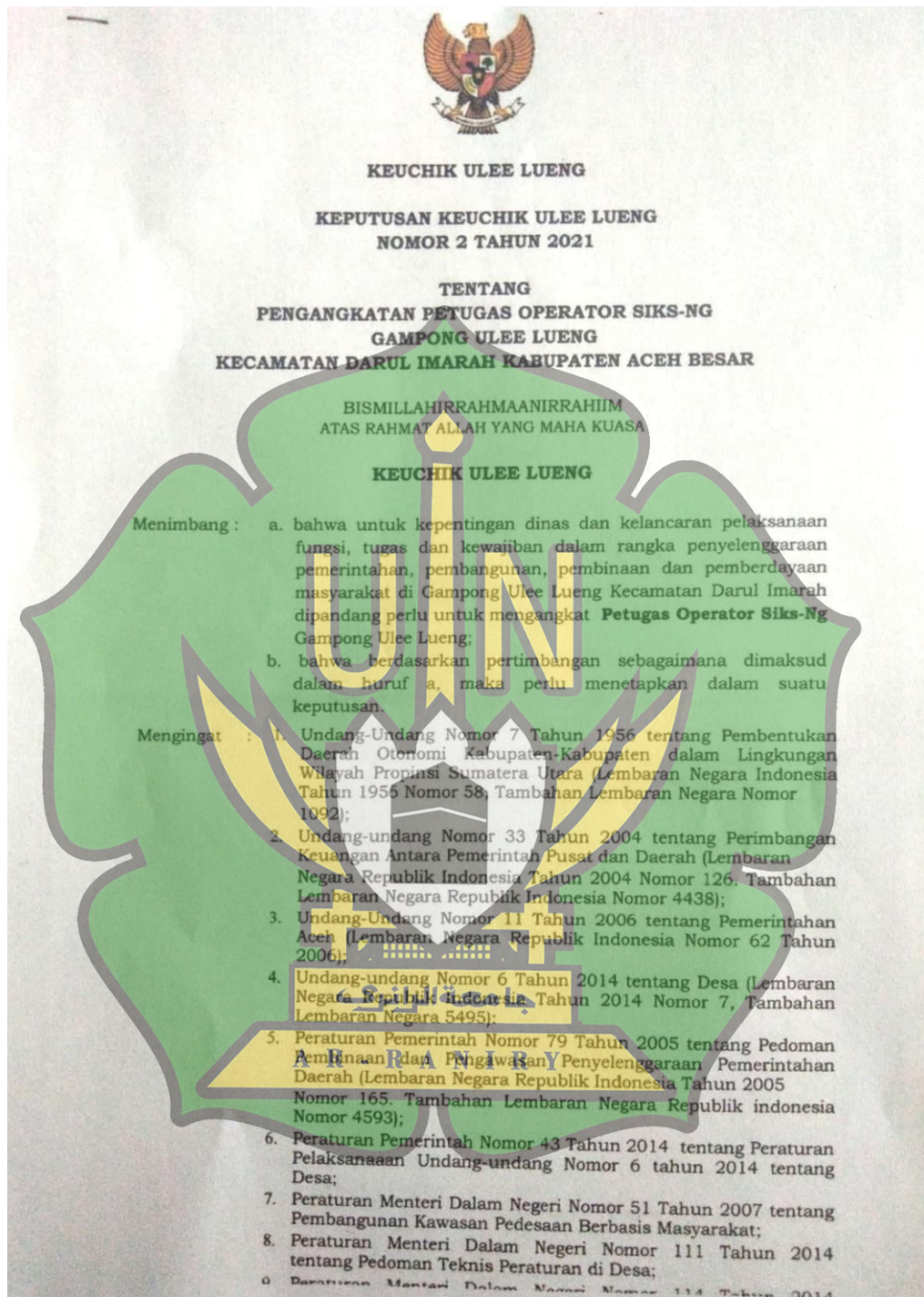
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13 November
2024

AR - RANIRY
Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 Surat Keputusan Operator Gampong Ulee Lueng



10. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat sdr. **Nurul Azmi, ST** Tempat dan Tanggal Lahir Lhoong 14 April 1995 Pendidikan Sarjana Teknik sebagai **Petugas Operator SIKS-NG** Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- KETIGA** : Keputusan Keuchik Gampong ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Ulee Lueng
 Pada Tanggal : 1 Oktober 2021 M

جامعة الرانير

A R - R A N I R



TEMBUSAN

1. Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kab. Aceh Besar;
3. Camat Darul Imarah;
4. Imcum Mukim Daroy Jeumpet
5. Ketua Tuha Peut Gampong Ulee Lueng
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Skripsi

Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong Di Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh

- 1) Bagaimana sejarah tentang aplikasi SIGAP ini?
- 2) Bagaimana cara DPMG melakukan sosialisai tentang aplikasi SIGAP di Gampong
- 3) Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi ke Gampong?
- 4) Pelatihan seperti apa yang diberikan oleh DPMG kepada operator Gampong tentang bagaimana cara mengoperasikan apliasi SIGAP?
- 5) Apakah pengembangan konsep SIGAP dalam menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sudah dilakukan?
- 6) Dalam bentuk apa saja pengembangan konsep SIGAP ini dilakukan?
- 7) Koordinasi seperti apa yang dilakukan DPMG dengan DISKOMINFO terkait dengan mengembangkan SIGAP untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Gampong?
- 8) Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh DPMG dalam penguatan kapasitas aparatur Gampong?
- 9) Dalam Pergub Aceh Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Gampong dalam pasal 11 ayat 3 dijelaskan bahwa DPMG dan DISKOMINFO dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola untuk mendukung penerapan SIGAP di Gampong, jadi fasilitas seperti apa dan dalam bentuk apa yang diberikan?
- 10) Apa harapan DPMG kedepannya tentang penggunaan aplikasi SIGAP ini?

B. Kepala Gampong

- 1) Apa yang Bapak ketahui tentang aplikasi SIGAP?
- 2) Bagaimana tanggapan bapak tentang penggunaan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng?
- 3) Bagaimana respon aparatur Gampong tentang adanya apliksi SIGAP ini?
- 4) Bagaimana kapasitas sumber daya aparatur di Gampong Ulee Lueng?
- 5) Berapa jumlah aparatur yang ada di Gampong Ulee Lueng?
- 6) Apakah sarana dan prasarana di Gampong Ulee Lueng sudah memadai?
- 7) Apa saja faktor pendukung dari pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Gampong Ulee Lueng?

- 8) Apa saja faktor penghambat dari pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Gampong Ulee Lueng?
- 9) Bentuk pelatihan apa saja yang selama ini diikuti oleh aparatur Gampong di Gampong Ulee Lueng?
- 10) Seberapa efektif pengadaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik di Gampong dalam menginput data Masyarakat?
- 11) Sejauh ini apakah hanya mahasiswa KPM saja yang ditugaskan untuk menginput data di setiap Gampong?
- 12) Strategi apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Gampong di Gampong Ulee Lueng?
- 13) Apakah di Gampong Ulee Lueng ini pernah mengadakan pelatihan pengetahuan dan keterampilan aparatur Gampong, pemberdayaan masyarakat lokal, pelatihan pengembangan kepemimpinan, dan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi?
- 14) Apa solusi yang bapak berikan kepada aparatur Gampong agar penggunaan aplikasi SIGAP ini bisa berfungsi dengan baik dan dapat dipahami oleh aparatur Gampong itu sendiri?
- 15) Apa harapan bapak tentang penggunaan aplikasi SIGAP ini kedepannya?

C. Sekretaris Gampong

- 1) Apa yang Bapak ketahui tentang aplikasi SIGAP?
- 2) Bagaimana tanggapan bapak tentang penggunaan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng?
- 3) Apakah menginput, memperbarui data dan informasi sudah dilakukan oleh aparatur Gampong khususnya sekretaris dan operator Gampong?
- 4) Apakah terdapat hambatan dalam proses penginputan data ke SIGAP?
- 5) Siapa yang mensosialisasikan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng?
- 6) Program pelatihan apa saja yang selama ini pernah diikuti oleh aparatur Gampong untuk memaksimalkan kinerja aparatur Gampong?
- 7) Langkah-langkah apa saja yang dilakukan aparatur Gampong untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIGAP?
- 8) Bagaimana pemerintahan Gampong dalam mengelola, memperbarui, menjaga dan melindungi data dan informasi yang tersedia dalam aplikasi SIGAP apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
- 9) Apakah saran dan prasarana untuk menjalankan penggunaan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng sudah memadai?
- 10) Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya aparatur?
- 11) Apa harapan bapak tentang penggunaan aplikasi SIGAP ini kedepannya?

D. Operator Gampong

- 1) Apa yang Kakak ketahui tentang aplikasi SIGAP?
- 2) Bagaimana tanggapan kakak tentang penggunaan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng?
- 3) Apakah menginput, memperbarui data dan informasi sudah dilakukan oleh aparatur Gampong khususnya sekretaris dan operator Gampong?
- 4) Apakah terdapat hambatan dalam proses penginputan data ke SIGAP?
- 5) Siapa yang mensosialisasikan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng?
- 6) Program pelatihan apa saja yang selama ini pernah diikuti oleh aparatur Gampong untuk memaksimalkan kinerja aparatur Gampong?
- 7) Langkah-langkah apa saja yang dilakukan aparatur Gampong untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIGAP?
- 8) Bagaimana pemerintahan Gampong dalam mengelola, memperbarui, menjaga dan melindungi data dan informasi yang tersedia dalam aplikasi SIGAP apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
- 9) Apakah saran dan prasarana untuk menjalankan penggunaan aplikasi SIGAP di Gampong Ulee Lueng sudah memadai?
- 10) Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya aparatur?
- 11) Apa harapan bapak tentang penggunaan aplikasi SIGAP ini kedepannya?

E. Masyarakat

- 1) Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendengar tentang aplikasi SIGAP?
- 2) Bagaimana kemampuan aparatur Gampong dalam melayani kebutuhan bapak/ibu?
- 3) Apakah pelayanan yang diberikan oleh aparatur Gampong sudah baik/ memadai?
- 4) Berapa lama aparatur Gampong menindak lanjuti keluhan dan masalah yang terjadi di Masyarakat?
- 5) Apa tanggapan bapak/ibu mengenai tentang kondisi di Gampong Ulee Lueng ini?
- 6) Bantuan apa saja yang sering diberikan aparatur Gampong kepada Masyarakat yang memiliki kesulitan di bidang ekonomi?
- 7) Apa harapan bapak/ibu tentang kemajuan untuk Gampong Ulee Lueng kedepannya?

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Keuchik Gampong Ulee Lueng



Wawancara dengan Operator Gampong Ulee Lueng



Wawancara Dengan Sekretaris Gampong Ulee Lueng



Wawancara dengan Seksi Pengebangan Sistem Informasi Dan Kerjasama Gampong
DPMG Aceh



Wawancara dengan salah satu Masyarakat Gampong Ulee Lueng



Wawancara dengan salah satu Masyarakat Gampong Ulee Lueng



Wawancara dengan salah satu Masyarakat Gampong Ulee Lueng



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Yossy Dewirna
Tempat Tanggal Lahir : Manggis Harapan, 25 Agustus 2002
Nomor Handphone : 082286310002
Alamat : Manggis Harapan, Labuhanhaji, Aceh Selatan
Email : 200802037@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Padang Bakau
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Labuhanhaji
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri Unggul Darussalam Labuhanhaji

Sertifikat

Ma'had Jamiah : Baik | 2021 | Ma'had Jamiah
TOAFEL : 403 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A | 2020 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : A | 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Gampong Aceh